

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep pengelolaan

1. Pengelolaan

a. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁰

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.¹¹ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi maupun organisasi, manajer yang baik serta bekerja dengan langkah-langkah manajer yang fungsional, yaitu merencanakan,

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

¹⁰ Handayani, *Pengantar Studi*, 9.

¹¹ George R. Terry. *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), 168

mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dengan mudah dapat di capai dengan baik.

Suatu organisasi bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan tergantung dari pengelolaan manajemennya.¹² Terkait permasalahan pengelolaan keuangan pondok pesantren. Bank Indonesia dan Ikatan Indonesia (IAI) telah berinisiatif dan meneluarkan pedoman pencatatan akuntansi dan laporan keuangan yang di kenal sebagai pedoman akuntansi pesantren (PAP).¹³

b. Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dapat di gerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang di inginkan. Pengelolaan di butuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu.¹⁴

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang bekepentingan dalam suatu organisasi.

¹² Tehuayo Rosita, “*Pengelolaan Dana Mesjid Di Kota Ambon*” Tahkim: Vol. XVII, No, 1, Juni 2021 Hal. 98

¹³ Kurnia Rosna; Kurnia Ismail Wahyu, “*Evaluasi Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) Pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Anshor Kota Ambon*” Amal: Journal Of Islamic And Business (JIEB), Vol. 02. No. 02, Hal. 2

¹⁴ Husain usman, *teori praktik, dan riset pendidikan* (jakarta: PT Bumi Aksara,2006), 34.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat di ukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:¹⁵

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan
9. Mengadakan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

c. Fungsi pengelolaan

Sedangkan menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang di organisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.¹⁶

¹⁵ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta : Mitra Cendikia Press,2008), 59.

Henry Fayol mengemukakan ada lima fungsi pengelolaan yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pemberian perintah), *cordinating* (pengkordinasian), dan *controlling* (pengawasan),

Sedangkan menurut Harold Koonts dan Ceryl O'Donnel membagi fungsi pengelolaan menjadi lima 5, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *staffing* (kepegawaian), *Directing* (langsung), dan *Controlling* (pengawasan).

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antarlain *Planing* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan).¹⁷

Dari beberapa defenisi di atas dapat di pahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi perusahaan.

d. Pengelolaan yang baik

pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi penegembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik hal ini mengidikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan *kredibilitas*, *integritas* dan *otoritas* sebuah institusi dalam mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.

¹⁶ Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (malang Universitas Negeri Malang, 2003, 98-100.

¹⁷ Athoillah, *Dasar-Dasar*, 95-96

Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemelihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta suatu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya di perlukan untuk mencapai hasil yang di kehendaki.
2. Pengorganisasian (*organizing*) di artikan sebagai kegiatan megaplikasikan seluru kegiatan yang harus di laksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah di tetapkan
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menetapkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sesuai dengan perancangan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

B. Konsep Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segalah aktifitas serta tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk mememinta pertanggung jawaban tersebut.¹⁸

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di tuntut untuk memberikan pertanggung jawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan di keluarkanya dana selama tahun anggaran. Pertanggung jawaban tersebut di laksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang di lakukan oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.¹⁹

Akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat itu.²⁰ Mahmud mengatakan “akuntabilitas finansial, yaitu setiap rupiah yang di belanjakan harus dapat di pertanggung jawabkan dan di laporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah .²¹

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya transparansi para penyelenggaran sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai kmponen dalam pengelola sekolah.
2. Adanya standar kinerja, di setiap institusi yang dapat di ukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenanganya.

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, Hal. 20

¹⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, Hal. 177-178

²⁰ Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2009), Hal. 379

²¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* , (Jakarta: Erlangga, 2010), Hal. 81

3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang muda, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.²²

Pertanggungjawab begitu di tekankan dalam perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Dengan akuntabilitas akan membuat organisasi tertentu lebih memperhatikan kepentingan sosial. Adanya akuntabilitas ini menurut perusahaan lebih memperhatikan *stakeholder* dan lingkungan daripada *stakeholder* semata.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas di dalam manajemen berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Pertanggungjawab dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

b. Asas-asas akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Komitmen pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²² Jamal Ma'Ruf Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Keuangan sekolah*, (Jogyakarta: DIVA Pres 2012), Hal. 2020-221

3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang di tetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang di peroleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.²³

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan yang di lakukan dan hasil akhirnya harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka maka dappat di simpulkan bahwa asas-asas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus di buat oleh pemegang keputusan sehingga hasil yang di harapkan akan tercapai dan dapat di laporkan kepada masyarakat.

c. Tujuan akuntabilita

Manajemen suatu organisasi harus “ *accountable* “ untuk :

1. Menentukan tujuan yang tepat
2. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang di tetapkan.
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
4. Mengembangkan standar oraganisasi dan operasi secara ekonomis dan efesien .²⁴

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya

²³ Sedarmayanti, *GOOD Gevernance “Kepemerintahan Yang Baik “*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hal 70-71

²⁴ Waluyo, *Manajemen publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hal. 197

memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan terhadap pelayanan pendidikan yang di selenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.²⁵

d. Manfaat akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

1. Menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
2. Motivasi terciptanya transparansi dan *reponsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadi organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.²⁶

²⁵ Slamet Suyanto, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), Hal. 5

²⁶ Waluyo, *Manajemen publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hal. 182

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

e. Indikator keberhasilan akuntabilitas

Terdapat beberapa tahap untuk menjaminya akuntansi terlaksana, yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus di buat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan suda memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholder*
 - c. Adanya kejelasan dari sarana kebijakan yang diambil, dan suda sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsisten maupun kelayakan dari target operasional yang telah di tetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kegiatan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik, adalah:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.

- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan di buat dan mekanismen pengaduan masyarakat.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah di capai oleh pemerintah.²⁷

Dari uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah ukuran yang dapat digunakan sekolah untuk menentukan tingkat kinerja dan membuat masyarakat sekolah puas dengan hasil kerja yang dicapai oleh sekolah tersebut.

C. Konsep Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi emiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran..²⁸.transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses infrmasi yang benar, jujur, dan tidak distriminatif

Tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.²⁹

Transparani adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan

²⁷ Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 398-399

²⁸ Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pertanggung Jawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, (Malang Banyumedia Publishing, 2005), Hal. 58

²⁹ Edah Jubaedah Dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota*, (Bandung BKP2AI LAN, 2008) Hal. 57-58

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi anggaran didefinisikan sebagai ketebukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.³⁰ Transparansi pengelolaan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.³¹

Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya rincian dan penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan semua pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.³²

Dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2009 sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dana penggunaan BOS Reguler, sekolah harus mempublikasi dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasi oleh sekolah meliputi realisasi penggunaan dana tiap sumber dana rekapitulasi realisasi penggunaan dana. Laporan tersebut harus dipublikasi setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan

³⁰ Nico Andrianto, *Good e Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hal. 20

³¹ Indra Bastian, *Akunansi Yayasan Dan Lembaga Publik*, (Jakarta; Erlangga, 2006), Hal. 4

³² Sri Minatri, *manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Hal. 224

tersebut. Publikasi laporan di lakukan melalui pemasangan kepada papan informasi sekolah atau tempat lainya yang muda di akses oleh masyarakat.³³

Transparansi dalam islam adalah siddiq, maksud dari siddiq adalah jujur, menyampaikan apa yang sebenarnya sehingga dengan kebenaran tersebut dapat di percaya oleh orang lain. Berikut surat yang menjelaskan tentang transparansi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Is’ra:35)

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaran untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah yang lebi baik bagi kamu di dunia dan akhirat.

Dari beberapa pemaparan di atas mengenai transparansi maka dapat di simpulkan bahwa transparansi adalah adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan khususnya dalam manajemen keuangan yang di lakukan oleh pihak sekolah kepada semua pihak. Dengan adanya transparansi maka akan meningkatkan dukungan dan menciptakan kepercayaan timbal balik antara

³³ Permendikbud No. 18 Tahun 2019

pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

b. Tujuan transparansi

Tujuan transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang di laksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan.³⁴

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat di rasakan oleh *stakeholder* dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang di laksanakan
5. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.³⁵

Tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah di akses.

³⁴ Werren Bennis dkk, *bagaimanan pemimpin menciptakan budaya keterbukaan*, Terj Irene Novita, (Jakarta: Libri, 2009) Hal. 103

³⁵ Modul Khusus Komunitas, Transparansi Akuntabilitas (www.p2kp.org), diakses tanggal 09Desember 2020, Pukul10:55 WIB

- c. Tersedianya ;laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomodasi usulan/surat rakyat.
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi pada publik.³⁶

Dari peenjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa tujuan transparansi adalah meminimalisir penyelewengan penggunaan dana atau penggelapan dana sekolah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut di kelolah, dan juga mencegah ketidakpercayaan publik.

c. Manfaat transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.³⁷

Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagaiberikut:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih muda mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.

³⁶ Simson Werinom,dkk, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan*, (Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X, 2007) Hal. 8

³⁷ Sri Minatri, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mngelola Lebaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Hal. 224

5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kapasitas usaha.³⁸

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan atau korupsi.

d. Indikator keberhasilan transparansi

Keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut

1. Adanya kerangka kerja hukum sebagai transparansi.
 - a. Adanya peraturan perundang yang mengatur persoalan transparansi
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi efisiensi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisik.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya basis legal untuk pertanggung jawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintah.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)

³⁸ Nico Andrianto, *Good e-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hal. 21

- b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikanya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisik.
 - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit yang independen dan efektif.
- a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi adanya berkualitas.
 - c. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam aksus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b. Adanya kesempatan pada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.³⁹
1. Indikator Akuntabilitas terdiri dari :
- a. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
 - b. Adanya pengawasan terhadap proses penyusunan anggaran dana BOS.
 - c. Pengelolaan dana BOS memahami tugas dan fungsi terkait pelaporan pengelolaan dana BOS.

³⁹ Ibid., Hal. 21-22

2. Indikator Transparansi terdiri dari:

- a. Adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana BOS.
- b. Kemudahan pengaksesan informasi terkait penggunaan dana BOS.

D. Definisi Dana Bantua Operasional Sekolah (BOS)

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.⁴⁰ Dana BOS adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.⁴¹

Menurut “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam

⁴⁰ Moyudan, S. D. N. N., & Moyudan, S. D.

⁴¹Titi Arti. “Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bos Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Di Sma Negeri 21 Gowa” Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal. 8

program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.⁴²

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, “Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan

⁴²Sri Wayuni Okvita Sari; Hadiyanto; Yulianto Santoso. “*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)*” Hal. 1

pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 “Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasinon personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah”. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun), sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, maupun terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan terbatasnya anggaran pendidikan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan turunnya nilai tukar rupiah US dolar menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau

masyarakat yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya 10 tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana BOS adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai operasional satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.

E. Prinsip Pengelolaan Anggaran Dana Bos

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi

tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jendral Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. mendalami prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

1. Swakelola dan Partisipatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swakelola berarti pengelolaan sendiri. Swakelola yang dimaksud disini adalah swakelola dalam pengadaan barang barang/jasa pemerintah. Pengadaan dengan swakelola menta lainnya, atau oleh kelompok masyarakat. menurut Abu Sopian adalah pengadaan dimana kegiatan pengadaan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah penanggung

jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya atau oleh sekelompok masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi. Menurut Loina Lalolo Krina, partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Engkoswara, partisipasi adalah proses dimana pemegang kepentingan terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi pendidikan di sekolah. Melalui dewan sekolah (school council), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih

kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas.⁴³

2. Transparan

Menurut Engkoswara, manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan stakeholders terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang good governance dan clean governance.⁴⁴

Menurut Krina, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Krina, prinsip transparansi memiliki dua aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan

⁴³ Ismail Solikhatun, "*Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada AMK Negeri 1 Yogyakarta)*". Universitas. Yogyakarta. Jurnal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDNK Kemas 1 Surakarta.

⁴⁴ *Ibid*

masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

3. Akuntabel

Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab.⁴⁵ Menurut Nanang Fattah (dalam Ismi Solikhatun, ukuran pendidikan yang akuntabel adalah:

- a. Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus
- b. Kejadiannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada pencapaian tujuan
- c. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai Proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia
- d. Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.

Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor public adalah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban.

⁴⁵ Ismail Solikhatun, "*Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada AMK Negeri 1 Yogyakarta)*". Universitas. Yogyakarta. Jurnal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDNK Kemas 1 Surakarta.

4. Efektif dan Efisen

Menurut Mulyasa, efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil menempatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Menurut Mulyasa, suatu kegiatan dikatakan efektif jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Menurut Dharma, efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Dharma juga menjelaskan bahwa efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan.⁴⁶

Menurut Reeve laporan keuangan merupakan catatan dan rangkuman kegiatan transaksi untuk menyediakan informasi akuntansi kepada pemangku kepentingan. Menurut Suwardjono tujuan utama pelaporan keuangan organisasi nonbisnis seperti sekolah adalah harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Adapun tujuantujuan Spesifik dari pelaporan keuangan adalah:

⁴⁶ Ismail Solikhatun, "*Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada AMK Negeri 1 Yogyakarta)*". Universitas. Yogyakarta. Jurnal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDNK Kemas 1 Surakarta.

- a. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.
 - b. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi nonbisnis telah melaksanakan tanggungjawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya.
 - c. Menyediakan informasi tentang sumberdaya, kewajiban dan sumberdaya (aset) bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumberdaya tersebut.
 - d. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode.
 - e. Menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atas sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
 - f. Pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi yang disediakan.
5. Saling Percaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya diartikan sebagai mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata; menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada; dan

menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BOS jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayaan yang dimaksud yaitu orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju idealitas yang diinginkan dan kepala sekolah juga percaya pada guru untuk mengembangkan program-program kurikulumnya serta mengorganisir pelaksanaan program-program itu. Kepercayaan juga meliputi kepercayaan sekolah terhadap pemerintah sebagai pemberi dana dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS.

F. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Dwi Wahyuningsih, yang berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smp Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen yang menyimpulkan bawah 90% responden (guru 26 orang dan pegawai tata usaha 10 orang) menyatakan prosedur pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Gombong telah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan hanya 10% responden (1 orang guru dan 3 orang pegawai tata usaha) menyatakan tidak sesuai. Terkait penggunaan dana 29 BOS di SMPN 2 Gombong, 90% responden (guru 25 orang dan pegawai tata usaha 11 orang) menyatakan sudah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan hanya

10% (2 orang guru dan 2 orang pegawai tata usaha) menyatakan tidak sesuai.

Selanjutnya, terkait sasaran dana BOS di SMPN 2 Gombang, 97,5% responden (guru 26 orang dan pegawai tata usaha 13 orang) menyatakan sudah tepat dan hanya 2,5% (1 orang guru) menyatakan tidak tepat sasaran. Jadi, dapat disimpulkan sebagian besar responden berpendapat bahwa pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Gombang dari prosedur pengelolaan, penggunaan, dan sasaran dana BOS sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2015.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Abid Zulfikar yang berjudul analisis pengelolaan keuangan sekolah di Sma Negeri Se-Kabupaten Kendal'' menyimpulkan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal telah dilaksanakan dengan adil dan efisien dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: Pemerintah diharapkan mengeluarkan aturan mengenai format dalam menyusun RAPBS dan laporan Pertanggungjawaban APBS. Sekolah diharapkan mengklasifikasikan biaya sekolah berdasarkan jurusan dan jenjang kelas. Pengelola dan komite sekolah diharapkan meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan sekolah. Wali murid diharapkan membayar biaya sekolah sesuai waktu yang telah ditentukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farid Sapri yang berjudul “Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi Smk Negeri 1 Makassar” menyimpulkan bahwa secara parsial program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Makassar, sedangkan pendapatan orang tua tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Makassar. Secara simultan dana BOS dan pendapatan orang tua samasama memberikan pengaruh akan tetapi yang memberikan pengaruh yang dominan adalah dana BOS.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Subkhi Widyatmoko dan Suyatmini Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sd N Kemasari I Surakarta” menyimpulkan bahwa Dalam proses perencanaan pengelolaan Dana BOS komponen yang terlibat di dalam pengelolaan dana BOS adalah Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, sebaaian dewan guru, dan Komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS oleh tim manajemen bos sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya kami sering melibatkan beberapa stakeholder sekolah yakni pihak- pihak yang berkepentingan dengan

sekolah, dan mereka menjalankan perannya masing-masing yakni im Manajemen BOS, dewan guru, dan Komite sekolah.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Terdapat dua hal berbeda yang membedakan antara peneliti saya dengan penelitian sebelumnya

1. Di tinjau dari segi lokasi study yang diamana tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan tingkat argensinyapun berbeda.
2. Di tinjau dari metodi penelitian, diaman penelitian sebelumnya menggunakan metodi kuantitatif, dan penelitian saya saat ini menggunakan metodi penelitian kualitatif.